



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 351 /436.1.2/2014**

TENTANG

**'PROGRAM LEGISLASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah disosialisasikan kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015, dengan uraian dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Agustus 2014

WALIKOTA SURABAYA,


TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 188.45/351/436.1.2/2014
 TANGGAL : 8 Agustus 2014

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015

1. DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Indonesia	Pemungutan Retribusi terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Indonesia	4 V	5	6 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	7 V	8	9 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Tenaga Kerja; 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5. Kantor Imigrasi; 6. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;	10

2. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 3. Kecamatan; 4. Kelurahan	

3. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Surabaya	V		<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 	V		<ol style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan; Badan Lingkungan Hidup. 	

2	Pengelolaan dan Perlindungan Air Tanah	Pengelolaan dan Perlindungan Air Tanah	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 	
---	--	--	---	---	---	--	--

4. DINAS PERHUBUNGAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	V		<p>1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;</p> <p>2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</p> <p>3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;</p> <p>4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM.551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM. 191/MPP/Kep/6/2001.</p>	V	<p>1. Dinas Perhubungan;</p> <p>2. Badan Lingkungan Hidup;</p> <p>3. Badan Perencanaan Pembangunan.</p>		

2	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	Penyempurnaan pedoman dalam Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. 		V	Dinas Perhubungan.	
---	--	---	---	--	--	---	--------------------	--

5. DINAS KESEHATAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya		V	-		V	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	

6. DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	

7. BADAN KOORDINASI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	

8. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	V		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	

9. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Surabaya	pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya	V		Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.	

10. DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya	Pedoman dalam menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 4. Bagian Perencanaan.	
2	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	
3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	

11. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Penetapan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	V		Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	V		1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	
2	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	V				V	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

12. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penyempurnaan tujuan, kinerja dan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		V	-	V		1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya;	
2.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	V		1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.	

13. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zonasi Pesisir Kota Surabaya	Zonasi Pesisir Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.	

14. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	V		-	V		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
2.	Rumah Susun	Pengaturan Rumah Susun	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	V		1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;	
3.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013	Penambahan obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

4.	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	V	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.	
5.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	V	V		V	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.	

15. DINAS KEBAKARAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Badan Lingkungan Hidup; 2. Dinas Kebakaran; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematasan; 6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

16. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI